

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keamanan laut Indonesia merupakan isu strategis nasional yang membutuhkan perhatian serius karena wilayah perairan Indonesia menjadi salah satu jalur mobilitas perdagangan internasional yang paling sibuk di dunia. Sebagai negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai yang sangat panjang, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa seluruh wilayah perairannya berada dalam pengawasan yang efektif dan konsisten. Literatur keamanan maritim menegaskan bahwa negara kepulauan seperti Indonesia memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas batas, termasuk penyelundupan narkoba, perdagangan orang, dan illegal fishing, yang sering kali dilakukan secara terorganisir oleh jaringan internasional (Demirel, 2020; Vujić et al., 2022).

Selain itu, meningkatnya intensitas lalu lintas laut global memperbesar peluang terjadinya pelanggaran hukum, karena semakin banyak kapal asing dan domestik yang melintas di perairan Indonesia tanpa dapat diawasi secara sempurna. Kondisi geografis yang luas dan heterogen membuat setiap wilayah perairan memiliki karakteristik ancaman yang berbeda, sehingga menuntut pendekatan pengamanan yang adaptif dan berbasis analisis risiko.

Kapasitas aparat kepolisian perairan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan ketertiban maritim, terutama karena mereka bertanggung jawab langsung dalam patroli, investigasi, dan penegakan hukum di laut. Tugas personel kepolisian perairan menjadi sangat kompleks karena juga berkaitan dengan hukum laut internasional dimana kapal-kapal yang berlayar dari berbagai negara di dunia.

Konteks keamanan maritim dalam skala global dunia pada umumnya saling terkait dan berhubungan, dimana tindak pidana di perairan terkadang melibatkan aktor atau pelaku kejahatan lintas negara yang mengharuskan petugas kepolisian perairan juga harus memahami hukum laut internasional.

Tren ancaman maritim di Indonesia terus menunjukkan peningkatan baik dari sisi jumlah kasus maupun pola kejahatan yang semakin kompleks. Penyebab utamanya adalah keterlibatan jaringan kriminal internasional yang memanfaatkan luasnya wilayah perairan Indonesia sebagai jalur penyelundupan narkoba, perdagangan orang, dan pelanggaran kemigrasian. Literatur keamanan maritim menegaskan bahwa kejahatan transnasional di laut semakin sulit ditangani karena para pelaku menggunakan teknologi modern, rute tersembunyi, dan struktur organisasi yang rapi untuk menghindari deteksi aparat (Purwantomo et al., 2021). Selain itu, dinamika ancaman yang berubah cepat menuntut aparat penegak hukum untuk tidak lagi mengandalkan strategi patroli konvensional yang terbatas dalam jangkauan dan fleksibilitas (Kataria & Emad, 2022).

Oleh karena itu, penguatan kemampuan komandan kapal sebagai pemimpin operasional sangat strategis, karena keberhasilan operasi keamanan laut sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan, penguasaan teknis, dan kemampuan pengambilan keputusan mereka dalam situasi kritis (Hasan et al., 2016). Dengan demikian, upaya peningkatan profesionalisme komandan kapal merupakan langkah penting dalam memastikan keamanan laut nasional tetap terjaga secara berkelanjutan.

Dalam situasi ini, komandan kapal memegang peran penting sebagai pemimpin operasional yang harus mampu mengambil keputusan cepat dan tepat di tengah kondisi maritim yang tidak menentu. Oleh karena itu, kemampuan taktis, analitis, dan kepemimpinan adaptif menjadi kompetensi wajib bagi komandan kapal untuk merespons ancaman yang semakin beragam dan terstruktur (Widodo & Prasetyo, 2023). Data Ditpolair Korpolaairud tahun 2025 menunjukkan bahwa jumlah kasus kejahatan maritim mencapai 92 perkara yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu konvensional, kekayaan negara, dan antarnegara. Dari jumlah tersebut, kategori kekayaan negara menjadi yang paling dominan dengan 46 kasus yang meliputi illegal fishing, penyelundupan benih bening lobster, dan pelanggaran terkait sumber daya alam lainnya.

Studi empiris menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kekayaan negara tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, tetapi juga berdampak langsung pada keberlanjutan ekosistem laut, sehingga mengancam ketahanan sumber daya perikanan nasional (Prakoso et al., 2023). Selain itu, kerusakan ekosistem yang ditimbulkan dapat mempengaruhi mata pencaharian masyarakat pesisir dan memperburuk ketimpangan sosial di wilayah maritim (Suherman et al., 2024). Kompleksitas dan dampak multidimensi dari kasus-kasus tersebut memperlihatkan bahwa penanganannya membutuhkan aparat yang memiliki kompetensi hukum, taktis, dan ekologis yang memadai (Nugroho & Sumirat, 2022).

Dengan demikian, Polri memerlukan sumber daya manusia yang terlatih secara profesional, termasuk komandan kapal yang mampu memimpin operasi penegakan hukum maritim secara efektif dan berintegritas.

Tabel 1.1.Kasus Perkara Tahun 2025

NO	JENIS PERKARA		JUMLAH
1	2		3
A	KONVENSIONAL		11
1	Pelayaran		0
2	Pencurian		0
3	Penadahan		0
4	Penggelapan		1
5	Pemalsuan Dokumen		5
6	Curat		0
7	Pangan		0
8	Perdagangan		1
9	Pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil		0
10	Penipuan		0
11	Penganiayaan		1
12	Telekomunikasi		0
13	Kesehatan		1
14	Cukai		1
15	Penyalahgunaan Sajak		0
16	Kelalaian		0
17	Pembunuhan		1
B	KEKAYAAN NEGARA		46
1	ILLEGAL FISHING	KIA	0
		Baby lobster (BL)	4
		Kepiting telur	0
		Alat tangkap (trawl, omsi)	5
		Perikanan	2
		Dokumen	3
		Destruktif Fishing (Bius/Bom ikan)	5
2	Handak		7
3	Illegal Logging		2

4	Minerba	4
5	Illegal Oil (Migas)	5
6	Budidaya Tanaman	0
7	Karantina	5
8	KSDA	4
9	Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0
10	Penyalahgunaan Jabatan	0
C	ANTAR NEGARA	35
1	Kepabeanan	2
2	Keimigrasian	3
3	Narkotika	22
4	TPPO	0
5	Perlindungan Pekerja Imigran Indonesia	8
	JUMLAH	92

Aktivitas ilegal di perairan seperti *Illegal Fishing* merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap kekayaan negara karena secara langsung mengancam keberlanjutan sumber daya laut yang menjadi penopang ketahanan pangan nasional. Praktik ini umumnya dilakukan dengan menggunakan alat tangkap destruktif seperti trawl dan bahan peledak yang menyebabkan kerusakan ekosistem dalam skala besar. Literatur mencatat bahwa kerusakan tersebut dapat memutus rantai makanan laut, menurunkan populasi ikan, serta mengancam kelangsungan hidup nelayan tradisional yang bergantung pada sumber daya perikanan lokal (Kataria & Emad, 2022).

Selain itu, kerusakan ekosistem akibat illegal fishing memerlukan waktu yang sangat panjang untuk pulih, sehingga berdampak pada keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir (Lemdiklat Polri, 2023). Penanganan *illegal fishing* tidak hanya menuntut kemampuan teknis penegakan hukum, tetapi juga pemahaman ekologis yang baik agar operasi yang dilakukan tidak memperburuk kerusakan lingkungan (Suherman et al., 2024). Penelitian internasional mengungkapkan bahwa pelaku kejahatan lebih memilih jalur laut sebagai rute utama karena pengawasan yang lebih longgar dan area perairan yang sangat luas, sehingga peluang untuk lolos dari deteksi aparat menjadi lebih besar (Demirel, 2020). Selain itu, sindikat penyelundupan memanfaatkan kapal kecil, rute zig-zag, serta teknologi komunikasi tertutup yang membuat kegiatan mereka sulit dilacak secara real time (Hasan et al., 2016). Dalam menghadapi modus yang semakin canggih tersebut, komandan kapal

perlu memahami aspek hukum internasional, termasuk perjanjian maritim dan ketentuan mengenai wilayah yurisdiksi penegakan hukum.

Kemampuan intelijen dasar juga harus di miliki mereka untuk membaca pola pergerakan dan indikasi awal aktivitas ilegal berdasarkan informasi di lapangan maupun data analitik (Vujičić et al., 2022). Oleh karena itu, kecakapan teknis, ketajaman analisis, dan pemahaman hukum menjadi kompetensi esensial bagi komandan kapal dalam menindak berbagai bentuk kejahatan maritim lintas negara. Ancaman perompakan dan pembajakan laut masih menjadi bagian dari tantangan keamanan maritim Indonesia meskipun frekuensinya menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pembajakan tetap dianggap berbahaya karena dapat mengganggu keselamatan awak kapal, menimbulkan kerugian ekonomi yang besar, serta mengacaukan kelancaran jalur perdagangan internasional yang melalui perairan Indonesia. Literatur internasional menunjukkan bahwa tindakan pembajakan sering dilakukan secara terorganisir dengan memanfaatkan celah pengawasan dan kondisi geografis tertentu yang sulit dijangkau oleh aparat keamanan (Hasan et al., 2016).

Beberapa kelompok perompak menggunakan taktik penyamaran dan serangan cepat, sehingga kapal-kapal patroli harus memiliki kesiapsiagaan tinggi untuk merespons ancaman tersebut secara efektif (Reio et al., 2017). Dalam konteks ini, komandan kapal memiliki peran vital karena mereka bertanggung jawab untuk mengidentifikasi potensi risiko, menentukan strategi pencegahan, dan mengambil keputusan cepat saat menghadapi situasi berbahaya (Sunaryo & Widodo, 2022). Oleh karena itu, kemampuan kepemimpinan, manajemen risiko, dan ketajaman analisis sangat diperlukan agar komandan kapal dapat memastikan keamanan operasional di wilayah maritim Indonesia yang rawan.

Di tengah meningkatnya ancaman maritim, pemanfaatan teknologi modern telah menjadi elemen kunci dalam mendukung efektivitas pengawasan wilayah perairan Indonesia. Teknologi seperti radar, *Automatic Identification System* (AIS), komunikasi satelit, dan pemantauan berbasis data memberikan kemampuan deteksi dini yang jauh lebih cepat dan akurat dibandingkan metode manual. Dengan adanya perangkat ini, aparat dapat memantau pergerakan kapal secara real time dan mengidentifikasi aktivitas mencurigakan sebelum terjadi pelanggaran yang lebih

besar. Literatur menegaskan bahwa penguasaan teknologi maritim harus menjadi komponen inti dalam pendidikan kepolisian karena kemampuan teknis aparat sangat menentukan keberhasilan operasi di laut (Kataria & Emad, 2022).

Laporan pendidikan kepolisian juga menunjukkan bahwa tanpa integrasi teknologi modern, proses pembelajaran bagi calon komandan kapal tidak akan mampu mengikuti kompleksitas tantangan keamanan maritim saat ini (Lemdiklat Polri, 2023; Prakoso et al., 2023). Oleh sebab itu, modernisasi kurikulum dan peningkatan fasilitas berbasis teknologi menjadi kebutuhan mutlak untuk memastikan bahwa komandan kapal memiliki kompetensi yang relevan dengan standar operasional masa kini. Penyelenggaraan pendidikan kepolisian, termasuk pendidikan komandan kapal, telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2010 serta Keputusan Kabaharkam Polri Nomor Kep/74/XII/2020 yang menetapkan standar kompetensi khusus. Kedua regulasi tersebut memberikan pedoman mengenai struktur program, kompetensi inti, serta kualifikasi profesional yang harus dipenuhi oleh setiap peserta pendidikan.

Literatur evaluasi pendidikan menegaskan bahwa keberadaan standar formal tidak otomatis menjamin kualitas implementasi di lapangan karena banyak program pelatihan gagal mencapai tujuannya akibat kurangnya evaluasi sistematis dan berkelanjutan (Stufflebeam & Coryn, 2014). Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa kurikulum benar-benar relevan dengan kebutuhan operasional dan selaras dengan dinamika ancaman maritim yang terus berkembang (Saad & Mat, 2023). Selain itu, evaluasi juga berfungsi untuk mengidentifikasi kelemahan dalam proses pembelajaran, kinerja instruktur, serta kecukupan sarana prasarana yang digunakan dalam program pendidikan (Reio et al., 2017).

Oleh sebab itu, pelaksanaan evaluasi terhadap program Dikbangspes menjadi langkah strategis untuk menjamin bahwa lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar profesional kepolisian perairan. Dikbangspes Komandan Kapal merupakan program pendidikan yang dirancang secara khusus untuk meningkatkan profesionalisme aparat kepolisian laut melalui penguatan kompetensi teknis, kepemimpinan, dan pemahaman hukum. Program ini menjadi instrumen penting dalam mempersiapkan komandan kapal agar mampu menghadapi berbagai tantangan operasional yang kompleks di wilayah maritim

Indonesia. Namun, meskipun program ini memiliki tujuan strategis, hingga kini belum terdapat penelitian komprehensif yang menilai efektivitasnya menggunakan model evaluasi pendidikan yang sudah terbukti secara ilmiah seperti CSE-UCLA atau Kirkpatrick (Demirel, 2020).

Ketiadaan evaluasi mendalam tersebut menyebabkan kualitas implementasi program belum dapat diukur secara objektif, terutama terkait relevansi kurikulum, kompetensi instruktur, dan dampak pelatihan terhadap kinerja lulusan di lapangan (Saad & Mat, 2023). Hal ini memperlihatkan adanya celah ilmiah penting yang menuntut penelitian lebih lanjut, khususnya untuk memastikan bahwa program benar-benar memenuhi standar operasional dan kebutuhan institusional kepolisian perairan (Widodo & Prasetyo, 2023). Dengan demikian, pelaksanaan penelitian evaluatif menjadi sangat diperlukan untuk memberikan rekomendasi perbaikan berbasis bukti dan mendukung peningkatan kualitas Dikbangspes Komandan Kapal.

Evaluasi program pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melalui model evaluasi CSE-UCLA yang meninjau aspek kurikulum, metode pembelajaran, kompetensi instruktur, serta kelengkapan sarana dan prasarana untuk memastikan bahwa seluruh komponen saling mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Kajian evaluasi pendidikan menegaskan bahwa kualitas proses pembelajaran merupakan faktor utama yang memengaruhi hasil belajar, sehingga metode yang digunakan harus relevan, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik peserta (Stufflebeam & Coryn, 2014). Selain itu, kemampuan dan pengalaman instruktur juga berkontribusi besar terhadap efektivitas penyampaian materi, terutama dalam konteks pendidikan kepolisian yang menuntut keterpaduan antara teori dan praktik (Reio et al., 2017).

Sarana dan prasarana seperti ruang kelas, peralatan simulasi, kapal latih, dan perangkat teknologi modern menjadi elemen penting untuk mendukung pengalaman belajar yang realistis dan aplikatif (Lemdiklat Polri, 2023). Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, pembelajaran akan sulit mencapai standar kompetensi yang ditetapkan, terutama untuk pendidikan yang berorientasi pada keterampilan operasional seperti Dikbangspes Komandan Kapal. Oleh karena itu, penelitian evaluatif terhadap program Dikbangspes sangat penting untuk memberikan gambaran objektif mengenai aspek mana yang sudah optimal dan

mana yang memerlukan penguatan lebih lanjut. Sebaliknya, model Kirkpatrick melengkapi analisis tersebut melalui empat level penilaian, yaitu reaksi peserta, pembelajaran, perubahan perilaku, dan dampak kinerja, sehingga evaluator dapat menilai seberapa besar program memberikan perubahan yang bermakna setelah pelatihan berlangsung (Vujičić et al., 2022). Model ini menekankan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur dari proses belajar, tetapi juga dari penerapan kompetensi dalam konteks kerja nyata.

Integrasi kedua model ini terbukti memperkuat validitas evaluasi karena masing-masing model memiliki titik fokus yang saling melengkapi CSE-UCLA menekankan struktur program dan kualitas penyelenggaraan, sedangkan Kirkpatrick menekankan hasil perilaku dan dampak organisasi. Dengan menggabungkan keduanya, penelitian ini mampu menghasilkan potret evaluasi yang lebih utuh, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Pendekatan gabungan ini juga memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk merumuskan rekomendasi pengembangan Dikbangspes Komandan Kapal agar selaras dengan kebutuhan keamanan maritim yang semakin kompleks.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi Program Pendidikan Pengembangan Spesialis (Dikbangspes) Komandan Kapal di Pusat Pendidikan Kepolisian Perairan dan Udara Lemdiklat Polri. Program ini memiliki peran strategis karena bertujuan untuk membekali para calon komandan kapal dengan kompetensi teknis, kepemimpinan, dan hukum yang diperlukan dalam mengelola operasi di laut. Evaluasi program menjadi penting untuk memastikan bahwa seluruh materi yang diajarkan benar-benar relevan dengan kebutuhan tugas di lapangan dan juga sebagai bahan analisa dan evaluasi bagi pimpinan dan penyelenggara atau pengelola pusat Pendidikan kepolisian perairan untuk mengetahui dampak daripada Pendidikan untuk lebih efektifnya Pendidikan pengembangan spesialis komandan kapal tersebut.

Dalam literatur pendidikan kepolisian disebutkan bahwa program pelatihan harus selalu menyesuaikan dengan dinamika ancaman yang terus berkembang agar tetap efektif (Demirel, 2020; Vujić et al., 2022). Oleh sebab itu, penelitian ini menekankan pentingnya analisis mendalam terhadap kurikulum dan metode pengajaran yang digunakan. Dengan fokus ini, hasil penelitian diharapkan mampu menjadi rujukan bagi penyelenggara pendidikan dalam merumuskan strategi penguatan Dikbangspes.

Evaluasi yang dilakukan tidak hanya menekankan pada aspek kurikulum, tetapi juga pada metode pengajaran yang dipakai. Metode pengajaran harus mampu mengintegrasikan teori dengan praktik, sehingga peserta didik tidak hanya memahami konsep, tetapi juga dapat menerapkannya di lapangan. Penggunaan simulasi, studi kasus, dan latihan berbasis teknologi menjadi kunci dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Menurut penelitian sebelumnya, efektivitas program pelatihan sangat dipengaruhi oleh metode pembelajaran yang digunakan (Saad & Mat, 2023; Reio et al., 2017). Oleh karena itu, salah satu fokus penelitian ini adalah menilai sejauh mana metode yang dipakai dalam Dikbangspes sudah sesuai dengan tuntutan tugas maritim. Penilaian ini akan memberikan gambaran apakah kurikulum benar-benar kontekstual atau perlu dilakukan pembaruan.

Selain kurikulum dan metode, kompetensi instruktur menjadi elemen penting yang tidak dapat diabaikan dalam penelitian ini. Instruktur yang memiliki keahlian mumpuni, baik dari sisi akademik maupun praktis, akan mampu memberikan kontribusi besar terhadap kualitas pembelajaran. Pengalaman lapangan yang dimiliki instruktur juga menjadi faktor penentu dalam menciptakan pembelajaran yang aplikatif. Studi dalam bidang pendidikan kepolisian menegaskan bahwa kualitas instruktur sangat berpengaruh terhadap pencapaian hasil belajar peserta (Lemdiklat Polri, 2023; Sunaryo & Widodo, 2022).

Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana instruktur di Dikbangspes memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan, baik dari sisi pedagogis maupun profesionalitas lapangan. Analisis ini menjadi penting karena keberhasilan program sangat bergantung pada kualitas tenaga pendidik yang terlibat. Sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi salah satu fokus penelitian yang signifikan. Ketersediaan fasilitas belajar seperti ruang kelas, laboratorium maritim, simulasi kapal, hingga peralatan teknologi modern akan menentukan sejauh mana efektivitas proses pembelajaran dapat tercapai.

Sarana dan prasarana apabila tidak memadai, maka kualitas hasil pembelajaran pun akan berkurang. Literatur menunjukkan bahwa keberhasilan program pendidikan sangat dipengaruhi oleh dukungan infrastruktur yang tersedia (Prakoso et al., 2023; Nugroho & Sumirat, 2022).

Penelitian ini akan menilai apakah sarana yang dimiliki Lemdiklat Polri sudah memadai untuk mendukung pembelajaran praktis dan simulasi. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konkret bagi pengembangan fasilitas pendidikan ke depan. Aspek berikutnya yang menjadi fokus adalah dampak program terhadap kinerja lulusan di lapangan.

Evaluasi tidak hanya berhenti pada proses pembelajaran, tetapi juga harus melihat bagaimana lulusan mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan mereka saat bertugas. Hal ini mencakup kemampuan kepemimpinan, penegakan hukum, hingga pengambilan keputusan dalam situasi darurat. Dalam hal ini model evaluasi Kirkpatrick dapat dijadikan landasan evaluasi model Training karena menjawab beberapa hal antara lain:

1. untuk menjustifikasi anggaran pelatihan berada di tempat yang tepat dengan memperlihatkan bagaimana program pelatihan tersebut berkontribusi pada tujuan dan sasaran organisasi.
2. Penentuan apakah suatu program pelatihan dilanjutkan atau tidak, serta
3. memperoleh informasi mengenai bagaimana cara meningkatkan program pelatihan dimasa datang.

Dalam pemikirannya kirpatrick kemudian mempresentasikan empat level tahapan mengevaluasi program pelatihan:

Level 1 *reaction*, dimulai ketika seorang evaluator ingin mengetahui seberapa puas peserta pelatihan terhadap ekosistem yang terdapat dalam pelatihan antara lain respon peserta terhadap bahan ajar, instruktur, pelayanan, penyelenggara dan fasilitas pelatihan. Level pertama ini memberikan semacam masukan yang berguna sebagai bahan intropeksi bagi penyelenggara Diklat dalam penyelenggaraan kegiatan berikutnya. Hal-hal apa saja yang harus diperbaiki maupun hal-hal yang harus ditingkatkan tergambar dalam level ini. Sehingga apabila program dilaksanakan secara rutin setiap tahun maka akan muncul penyesuaian/modifikasi berdasarkan masukan/saran yang diberikan oleh peserta Diklat sebelumnya. Semakin banyak saran atau masukan yang positif akan menambah peningkatan kearah yang optimal.

Level 2 *learning* adalah evaluasi mengukur kemampuan siswa dalam memahami prinsip, prosedur dan konsep-konsep yang disajikan dalam materi ajar. Beberapa aspek yang bersinggungan dengan pencapaian level ini adalah tenaga pengajar/instruktur. Peran tenaga pengajar dalam membuat situasi pembelajaran yang efektif dinilai menjadi faktor yang utama. Level ini membantu peserta pelatihan untuk mengetahui perkembangan informasi dan teknologi, mempraktekkan sebuah alat atau mesin untuk menunjang kinerja perusahaan atau bahkan untuk pelatihan semisal kepemimpinan yang bertujuan untuk merubah *mindset* seseorang karyawan. Hasil level ini akan dibawa peserta pelatihan di tempat kerjanya.

Penguasaan kompetensi mutlak dituntaskan pada level ini. karena hasil *learning* akan menjadi pembeda pegawai yang belum dan yang sudah mengikuti pelatihan. Harapannya adalah peserta pelatihan dapat memberikan kontribusi terhadap perusahaan atau tempat dia bekerja.

Level 3 *behavior*, mengukur perilaku kinerja di tempat kerja setelah mendapat pelatihan. Perilaku yang dimaksud adalah perilaku yang selaras dengan bidang kerjanya. Sebagai contoh seorang karyawan yang telah mengikuti pelatihan datang tepat waktu sehingga target-target perusahaan dapat tercapai. Perilaku juga

dapat merujuk sikap kerja yang menunjukkan etos kerja yang tinggi, memberikan contoh bagi pekerja yang lain sehingga pekerja lain dapat menirunya.

Level ini juga mengukur tentang transfer ilmu pengetahuan yang dimiliki seorang karyawan/pekerja yang telah mengikuti sebuah pelatihan yang dapat memberikan dampak secara bersama-sama.

Level 4 *result*, menghubungkan hasil pelatihan terhadap peningkatan organisasi (David J. Basarab, 1990). Pimpinan perusahaan/lembaga tentu tidak mau mengambil resiko dalam membelanjakan dana-nya untuk kegiatan sebuah pelatihan. Pimpinan menghitung apakah *worted* dana yang dikeluarkan dengan peningkatan kinerja organisasi. Menjadi sebuah tantangan bagi divisi *training* untuk menjawabnya. Sesuai dengan alasan yang dikemukakan oleh Kirkpatrick bahwa evaluasi ini akan memberikan justifikasi anggaran apakah ditaruh ditempat yang tepat atau tidak. Seorang evaluator harus dapat meyakinkan kepada pucuk pimpinan melalui data-data yang akurat.

Menurut model Kirkpatrick, level dampak merupakan tahap paling kompleks namun paling terpenting dalam menilai keberhasilan suatu program pelatihan (Stufflebeam & Coryn, 2014; Saad & Mat, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini akan menelaah bagaimana program Dikbangspes memengaruhi kualitas kerja komandan kapal di lapangan. Hasil dari evaluasi ini akan memberikan gambaran riil tentang relevansi dan efektivitas program terhadap kebutuhan institusional.

Untuk memperoleh hasil evaluasi yang komprehensif, penelitian ini menggunakan kombinasi model CSE-UCLA dan Kirkpatrick. Model CSE-UCLA memberikan kerangka evaluasi yang menilai konteks, masukan, proses, dan keluaran, sementara model Kirkpatrick lebih menekankan pada reaksi peserta hingga dampak program. Penggabungan keduanya dianggap mampu menghasilkan evaluasi yang lebih menyeluruh. Dalam penelitian terdahulu, kombinasi dua model evaluasi sering digunakan untuk memperkuat validitas hasil (Vujičić et al., 2022; Demirel, 2020).

Fokus penelitian ini dengan demikian tidak hanya terletak pada aspek formal pendidikan, tetapi juga pada efektivitas implementasi program di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang terukur sekaligus praktis bagi Lemdiklat Polri. Pendekatan kombinasi ini juga memungkinkan peneliti untuk menangkap gambaran menyeluruh mengenai keberhasilan program, baik dari sisi akademik maupun dari sisi operasional nyata di lapangan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian Standar Kompetensi Kerja Khusus terhadap analisis kebutuhan Program Dikbangspes di Pusat Pendidikan Kepolisian Perairan dan Udara Lemdiklat Polri (*system assessment*)?
2. Bagaimana kesesuaian perencanaan kebutuhan penyelenggaraan Dikbangspes dalam aspek strategi pengembangan kurikulum, kualifikasi instruktur, perencanaan sarana prasarana, dan sistem administrasi terhadap pencapaian Standar Kompetensi Kerja Khusus di Pusat Pendidikan Kepolisian Perairan dan Udara Lemdiklat Polri (*program Planning*) ?
3. Bagaimana pelaksanaan program (*implementation*) dan reaksi siswa (*reaction*) terhadap Program Dikbangspes Komandan Kapal dalam hal efektivitas metode pembelajaran, ketersediaan sarana prasarana, penguasaan materi oleh instruktur, dan tingkat kepuasan siswa di Pusat Pendidikan Kepolisian Perairan dan Udara Lemdiklat Polri?
4. Bagaimana *improvement* dan *learning* dari Program Dikbangspes Komandan Kapal dalam meningkatkan pemahaman konsep pengetahuan terapan, kompetensi inti, dan pengetahuan manajemen pengoperasian kapal bagi siswa di Pusat Pendidikan Kepolisian Perairan dan Udara Lemdiklat Polri?
5. Bagaimana program *certification* dan perubahan perilaku (*behavior*) lulusan Dikbangspes Komandan Kapal dalam penerapan keterampilan navigasi dan pengembangan karakter siswa di lingkungan tugas di Pusat Pendidikan Kepolisian Perairan dan Udara Lemdiklat Polri?

6. Bagaimana dampak Penyelenggaraan Program Dikbangspes Komandan Kapal terhadap peningkatan kinerja komandan kapal?

1.4 Kegunaan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk memperkaya literatur mengenai evaluasi pendidikan kepolisian maritim, khususnya Program Pendidikan Pengembangan Spesialis (Dikbangspes) Komandan Kapal. Pertama, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada kajian efektivitas kurikulum pendidikan kepolisian, sehingga dapat diketahui sejauh mana kurikulum yang ada memenuhi *Standar Kompetensi Kerja Khusus Komandan Kapal Polisi*. Hasil penelitian ini juga dapat menambah wawasan mengenai integrasi metode pembelajaran modern berbasis digital dalam pendidikan maritim, yang selama ini belum banyak dikaji secara komprehensif. Kedua, penelitian ini akan memperluas kajian teoritis terkait peran kualifikasi instruktur dalam keberhasilan pendidikan kepolisian. Ketiga, penelitian ini memberikan dasar akademik tentang pentingnya sarana dan prasarana dalam mendukung efektivitas pembelajaran praktis dan simulasi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi bagi pengembangan model evaluasi program pendidikan berbasis pendekatan *CSE-UCLA* dan *Kirkpatrick*, yang dapat diadopsi dalam kajian pendidikan kepolisian maupun bidang pendidikan lainnya.

2) Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri (Lemdiklat Polri) dalam mengembangkan program Dikbangspes Komandan Kapal. Pertama, hasil penelitian akan memberikan masukan konkret mengenai efektivitas kurikulum, sehingga dapat dilakukan pembaruan materi ajar agar lebih relevan dengan kebutuhan tugas di lapangan. Kedua, temuan penelitian dapat menjadi dasar dalam memperkuat metode pembelajaran berbasis teknologi digital dan simulasi, sehingga pembelajaran lebih sesuai dengan tantangan era modern.

Ketiga, penelitian ini dapat memberikan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas instruktur, yang pada gilirannya menjadi bahan pertimbangan dalam

peningkatan kapasitas tenaga pengajar. Keempat, penelitian ini menilai kelayakan sarana dan prasarana pendidikan yang ada, sehingga menjadi rujukan bagi pengadaan maupun perbaikan fasilitas pembelajaran. Kelima, hasil penelitian ini memberikan informasi penting mengenai sejauh mana program Dikbangspes berdampak pada peningkatan kompetensi lulusan, sehingga Polri dapat menyesuaikan strategi pengembangan SDM untuk menghasilkan komandan kapal yang profesional, adaptif, dan berintegritas tinggi.

1.5 Kebaruan Penelitian (*State of The Art*)

Untuk mengidentifikasi gap penelitian secara sistematis, maka dilakukan analisis menggunakan pendekatan VOS Viewer terhadap literatur yang relevan dengan evaluasi program pendidikan maritim dan kepolisian. Analisis ini memberikan visualisasi jaringan konseptual penelitian yang telah dilakukan dan mengungkapkan area yang masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut. Dalam konteks penelitian ini, analisis VOSviewer dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Pertama, pengumpulan data literatur dari basis data akademik internasional seperti Google Scholar dan artikel jurnal yang terkait menggunakan kata kunci: "maritime education evaluation", "police training assessment", "Kirkpatrick model", "CSE UCLA model", "maritime law enforcement training". Periode pencarian mencakup publikasi dari tahun 2018 hingga 2025 untuk memastikan relevansi dan aktualitas literatur.

Kedua, proses pengambilan data dilakukan dengan menyeleksi artikel yang memenuhi kriteria dipublikasikan dalam jurnal bereputasi dengan peer-review, fokus pada pendidikan maritim atau kepolisian, dan tersedia dalam full-text. Dari hasil penelusuran artikel yang teridentifikasi awal sebanyak 339 artikel memenuhi kriteria inklusi untuk analisis lanjutan.

Ketiga, ekstraksi metadata dilakukan mencakup judul, abstrak, kata kunci penulis, tahun publikasi, dan sitasi. Data kemudian diimpor ke VOSviewer versi 1.6.20 untuk analisis co-occurrence. Parameter yang digunakan adalah minimum occurrence of keyword 5.



Gambar 1.1 *Network Visualitation*



Gambar 1.2. *Overlay Visualisation*

1.6 Hasil Visualisasi Jaringan Penelitian

Analisis VOSviewer menghasilkan visualisasi jaringan yang terdiri dari 19 item dengan 38 links dan total link strength 50. Jaringan ini membentuk enam cluster utama yang merepresentasikan tema penelitian dominan:

Cluster 1 (Merah) : Cluster ini mencakup 8 items dengan fokus pada law enforcement agency, marine dan model evaluasi CSE UCLA. Cluster ini menunjukkan dominasi penelitian pada aspek institusi dalam pendidikan maritim. Namun, kombinasi model evaluasi seperti yang digunakan dalam penelitian ini CSE-UCLA saja hanya muncul 1 kali, mengindikasikan gap penelitian signifikan.

Cluster 2 (Hijau) : Terdiri dari 5 items yang berfokus pada assessment, sample dan student. Penelitian spesifik tentang maritime police training yang sedikit menunjukkan keterbatasan studi pada domain ini.

Cluster 3 (Biru) : Mencakup 4 items dengan fokus pada development, evaluation, research. Hal ini juga menunjukkan bahwa penelitian tentang studi kepolisian perairan masih sangat sedikit.

Cluster 4 (Kuning) : Terdiri dari 2 items yang membahas tentang education atau pelatihan kepolisian perairan/maritim. Hal ini menunjukkan masih belum banyak yang melakukan penelitian di pusat pendidikan kepolisian perairan.

Berdasarkan analisis density visualization dari VOSviewer, beberapa gap penelitian teridentifikasi:

Gap 1: Kombinasi Model Evaluasi dalam Konteks Maritim Analisis menunjukkan bahwa kombinasi CSE-UCLA dengan Kirkpatrick dalam evaluasi pendidikan kepolisian perairan sangat jarang. Hal ini mengonfirmasi kebaruan penelitian ini yang mengintegrasikan kedua model untuk evaluasi komprehensif Program Dikbangspes Komandan Kapal.

Gap 2: Evaluasi Pendidikan Kepolisian Maritim Dari overlay visualization berdasarkan tahun publikasi, topik "maritime police training" mengindikasikan bahwa ini adalah area yang relatif baru dan belum banyak dieksplorasi. Penelitian tentang evaluasi program pendidikan khusus untuk komandan kapal polisi sangat sedikit dan hal tersebut menegaskan originalitas kontribusi penelitian ini.

Gap 3: Long-term Impact Assessment Analisis temporal menunjukkan bahwa penelitian tentang dampak jangka panjang (result level dalam Kirkpatrick) dari

program pendidikan maritim masih terbatas. mengindikasikan kurangnya studi longitudinal dalam domain ini.

1.7 Positioning Penelitian dalam Landscape Akademik

Berdasarkan hasil analisis maka gap yang teridentifikasi adalah sebagai berikut yaitu Pertama, penggunaan kombinasi model CSE-UCLA dan Kirkpatrick merupakan pendekatan inovatif yang belum banyak diterapkan dalam evaluasi pendidikan kepolisian perairan. Kedua, fokus spesifik pada evaluasi Program Dikbangspes Komandan Kapal memberikan kontribusi empiris pada area yang masih belum banyak di eksplorasi. Ketiga, pendekatan mixed-methods dengan triangulasi data dari berbagai sumber memperkuat validitas temuan dan memberikan model evaluasi yang dapat diadaptasi untuk konteks serupa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi gap empiris tetapi juga memberikan kontribusi metodologis pada bidang evaluasi program pendidikan maritim dan kepolisian. Dari berbagai data diatas maka secara jelas dapat di jabarkan bahwa kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan evaluasi yang digunakan, yaitu kombinasi model *CSE-UCLA* dan *Kirkpatrick* dalam menganalisis Program Pendidikan Pengembangan Spesialis (Dikbangspes) Komandan Kapal di Pusat Pendidikan Kepolisian Perairan dan Udara Lemdiklat Polri.

Penggabungan kedua model tersebut belum pernah diterapkan sebelumnya dalam konteks pendidikan kepolisian maritim di Indonesia. Dengan menggunakan dua model yang saling melengkapi, penelitian ini mampu mengukur efektivitas program secara menyeluruh, baik dari sisi Assesment, Planing, Implementation sekaligus mengevaluasi reaksi peserta, pembelajaran, perubahan perilaku, hingga dampak nyata di lapangan. Pendekatan evaluasi yang komprehensif ini menghadirkan perspektif baru tentang bagaimana pendidikan kepolisian dapat diselaraskan dengan kebutuhan operasional maritim yang semakin kompleks (Stufflebeam & Coryn, 2014; Saad & Mat, 2023).

Kebaruan juga tampak pada fokus penelitian yang secara khusus menelaah pendidikan bagi komandan kapal patroli polisi. Selama ini, sebagian besar penelitian di bidang pendidikan kepolisian lebih banyak membahas aspek pendidikan umum, kepemimpinan di darat, atau manajemen kelembagaan. Penelitian ini menawarkan kontribusi unik dengan menjadikan komandan kapal

patroli sebagai objek evaluasi utama. Fokus tersebut memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kebutuhan pelatihan khusus bagi pemimpin di lingkungan kepolisian perairan, yang menghadapi tantangan berbeda dibandingkan dengan kepemimpinan di daratan (Prakoso et al., 2023; Widodo & Prasetyo, 2023).

Selanjutnya, penelitian ini menempatkan konteks penegakan hukum di perairan sebagai aspek yang sangat relevan dan strategis. Evaluasi pendidikan dalam kerangka penegakan hukum maritim melibatkan isu-isu lintas batas, kejahatan transnasional, serta kebutuhan koordinasi antar instansi di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini belum banyak dijadikan fokus dalam penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi berharga untuk mengisi kekosongan literatur. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memperluas pemahaman akademik mengenai hubungan erat antara pendidikan kepolisian maritim dan dinamika keamanan laut global (Demirel, 2020; Vujičić et al., 2022). Kebaruan lain dari penelitian ini adalah eksplorasi integrasi kepemimpinan dan penegakan hukum dalam konteks operasional kapal patroli.

Penelitian ini mengevaluasi keterampilan kepemimpinan yang diperlukan dalam kondisi patroli, termasuk kemampuan mengambil keputusan cepat dalam situasi darurat serta membangun koordinasi dengan berbagai instansi. Pendekatan ini berpotensi memperluas pemahaman tentang pendidikan kepolisian dengan menekankan dimensi kepemimpinan adaptif di tengah kondisi lingkungan yang tidak pasti. Dengan demikian, penelitian ini dapat membuka jalan bagi pengembangan kurikulum yang lebih responsif terhadap kebutuhan praktis di lapangan (Sunaryo & Widodo, 2022; Hasan et al., 2016).

Aspek kebaruan berikutnya adalah pengembangan model evaluasi yang inovatif melalui kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif. Model ini disusun dengan mempertimbangkan karakteristik unik pendidikan kepolisian perairan, sehingga hasil evaluasi yang diperoleh tidak hanya komprehensif, tetapi juga kontekstual. Pendekatan holistik ini dapat menjadi kerangka kerja yang dapat direplikasi dalam konteks pendidikan lain yang membutuhkan keseimbangan antara teori dan praktik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan manfaat untuk pengembangan pendidikan maritim, tetapi juga memperkaya metodologi

evaluasi dalam kajian pendidikan secara umum (Reio et al., 2017; Kataria & Emad, 2022).

Selain itu, penelitian ini menekankan kebaruan pada integrasi teknologi digital dalam pendidikan kepolisian maritim. Evaluasi yang dilakukan mencakup sejauh mana program Dikbangspes telah mengadopsi *digital learning*, simulasi interaktif, dan perangkat lunak pembelajaran modern. Integrasi teknologi ini sangat penting mengingat kompleksitas ancaman maritim yang semakin membutuhkan penguasaan peralatan modern. Dengan menelaah aspek ini, penelitian dapat memberikan rekomendasi praktis untuk memperkuat kurikulum berbasis teknologi dalam pendidikan kepolisian. Hal ini selaras dengan tuntutan globalisasi dan digitalisasi dalam sektor keamanan (Suherman et al., 2024; Lemdiklat Polri, 2023). Kebaruan penelitian ini juga menekankan pada pengembangan kapasitas individu, khususnya komandan kapal sebagai pemimpin di lapangan. Fokus pengembangan keterampilan berkomunikasi, pengambilan keputusan yang cepat, manajemen konflik, serta pemahaman hukum laut internasional merupakan elemen penting yang sering diabaikan dalam kurikulum tradisional. Dengan menambahkan perspektif ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih utuh dalam mempersiapkan komandan kapal menghadapi tantangan operasional sekaligus meningkatkan kualitas kepemimpinan.

Hal ini akan memperkuat relevansi program pendidikan kepolisian maritim dengan kebutuhan nyata di lapangan (Nugroho & Sumirat, 2022; Vujičić et al., 2022). Selain itu, penekanan pada kapasitas individu ini diharapkan dapat menciptakan komandan kapal yang lebih adaptif terhadap dinamika maritim global. Pendekatan tersebut juga berpotensi memperkuat daya saing institusi kepolisian maritim Indonesia dalam menghadapi standar internasional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat secara akademik, tetapi juga memberikan kontribusi praktis terhadap peningkatan profesionalisme aparat kepolisian laut.